



# **RENCANA KERJA PERUBAHAN**

**TAHUN 2019**

**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**( DPMP TSP )**

**KABUPATEN PINRANG**



**TAHUN 2019**





## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan) SKPD Tahun Anggaran 2016.

Sebagai Pengguna Anggaran, kami bersyukur bisa menyelesaikan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan - SKPD) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang yang merupakan perencanaan perubahan anggaran untuk tahun 2019 pada instansi kami.

Renja Perubahan - SKPD Tahun Anggaran 2019 ini, disusun sesuai amanat Permendagri nomor 54 tahun 2010. Penerbitan Renja Perubahan -SKPD ini diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan anggaran perubahan instansi kami sehingga dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pengelolaan pelayanan perizinan secara profesional, partisipatif, dan akuntabel, sebagai bagian tidak terpisahkan terwujudnya " Good Governance"

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan penyusunan laporan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) tahun 2019 ini.

Pinrang, Agustus 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

**ANDI MIRANI, AP.,M.Si**

Pangkat : Pembina TK.I

Nip. 19740603 199311 2 001



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	i
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
1.1 Latar Belakang	,.....	1
1.2 Landasan Hukum	.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan Perubahan.....		6
1.4 Visi dan Misi DPMPTSP	.....	6
1.5 Sistematika Penulisan	.....	8
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2019</b>		
2.1 Pelaksanaan Dokumen Anggaran Tahun 2019.....		9
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai Triwulan III tahun 2019	.....	15
<b>BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DALAM PROGRAM DAN KEGIATAN DISERTAI INDIKATORNYA</b>		
3.1 Tujuan dan Sasaran	.....	21
3.2 Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2019...		22
3.3 Indikator Kinerja	.....	30
3.4 Kelompok Sasaran Program dan Kegiatan BP2TPM	.....	31
3.5 Sumber Dana Yang Dibutuhkan Untuk menjalankan Program dan Kegiatan	.....	35
<b>BAB IV PENUTUP</b>		
4.1 Hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan	.....	38



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Tabel Pelaksanaan Dokumen Anggaran Tahun 2019.....	9
Tabel 2.2 : Tabel Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai Triwulan III...	15
Tabel 3.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Pinrang .....	22
Tabel 3.2 : Rencana Perubahan Program dan Kegiatan DPMPTSP 2019..	23
Tabel 3.3 : Kelompok Sasaran tahun 2019.....	31
Tabel 3.4 : Indikator Kinerja Sasaran DPM PTSP Tahun 2019.....	37
Tabel. 3.5 : Tabel Sumber Dana yang dibutuhkan .....	35
Lampiran Matrik Rencana Program dan Kegiatan	



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pelayanan merupakan salah satu bentuk wujud dari upaya pemerintah untuk melayani masyarakatnya. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan penerapan pelayanan prima yang efektif dan efisien sehingga pelayanan menjadi ujung tombak dalam mewujudkan pembangunan dan menggerakkan perekonomian masyarakat.

Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan - SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang Tahun 2019, disusun dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah di bidang Pelayanan Masyarakat, serta memperhatikan program dan kegiatan yang mengalami perubahan. Program dan kegiatan pokok anggaran yang ada serta pencapaian target program unggulan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan adanya penambahan anggaran perubahan yang disediakan dan disesuaikan dengan plafond anggaran dari APBD perubahan Tahun 2019.

Renja Perubahan DPMPTSP tahun 2019 memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan memuat tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target pencapaian kinerja, pengorganisasian program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta program-program unggulan disesuaikan dengan kebutuhan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang dengan berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) tahun 2019.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) DPMPTSP yang merupakan dokumen perencanaan perubahan untuk semester kedua sebagai evaluasi pelaksanaan anggaran pokok rencana kerja tahun 2019 dengan memperhatikan Rencana Kerja SKPD tahun 2019 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang.



Kantor Pusat Pelayanan Publik Kabupaten Pinrang (KP3KP) merupakan pusat kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan. Pusat Pelayanan Publik meliputi Pelayanan Perizinan Usaha dan Non Usaha serta Pelayanan Perizinan Penanaman Modal, dapat memudahkan masyarakat umum dan para investor untuk memenuhi kebutuhannya. Kantor P3KP berada dalam satu atap dengan menerapkan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan operasional penyusunan Renja Perubahan DPMPTSP Kabupaten Pinrang meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);



- 6) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 8) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4888);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 18) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2009 – 2014 ;
- 19) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);





- 20) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 13);
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor 1);
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014 Nomor );
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6);
- 25) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman dan tatacara perizinan dan fasilitas penanaman modal
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DPMPTSP Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019



### 1.3 Maksud dan Tujuan Perubahan

Penyusunan Renja Perubahan-SKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2019 dimaksudkan untuk :

- Sebagai dasar/pijakan dalam melaksanakan Rencana Kerja Anggaran Perubahan-SKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2019;
- Dokumen Renja Perubahan-SKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2019 harus bersinergis dengan RPJP Kab. Pinrang 2030-2050, RPJM Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) perubahan Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019, RPJM Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2014 – 2019 dan Renja SKPD DPMPTSP tahun 2019;
- Sebagai suatu dokumen perencanaan untuk penilaian semesteran terhadap hasil capaian kinerja pada tahun anggaran 2019.
- Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja DPMPTSP pada Triwulan Pertama dan ketiga di tahun 2019

Renja-Perubahan SKPD DPMPTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2019 bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi hasil capaian kinerja pada semesteran awal dalam perwujudan capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Pinrang tahun 2019.

### 1.4 Visi dan Misi DPMPTSP

DPMPTSP Kabupaten Pinrang sebagai perangkat daerah memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman modal sebagai urusan wajib Pemerintah daerah pada sektor penanaman modal. DPMPTSP Kabupaten Pinrang memiliki visi masa depan sebagai penjabaran dari visi Pemerintah daerah dalam RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 – 2019, adapun Visi DPMPTSP Kabupaten Pinrang yang



tertuang dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2014 – 2019 sebagai berikut :

**“Terwujudnya kualitas pelayanan dalam menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan atraktif untuk pertumbuhan ekonomi daerah”**

Pernyataan visi di atas mengandung tiga frase kunci, yaitu “kualitas pelayanan”, “iklim penanaman modal yang berdaya saing”, dan “pertumbuhan ekonomi daerah”. Adapun kandungan dari tiga frase kunci tersebut sebagai berikut :

“Kualitas pelayanan” adalah bentuk aktivitas yang dilakukan DPMPTSP Kabupaten Pinrang untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan penanaman modal berupa kemudahan, kecepatan, ramah, dan kepastian hukum. Pengembangan SPM, SPP, dan SOP akan terus dilakukan untuk senantiasa dievaluasi untuk peningkatan kualitas pelayanan. Pelayanan yang baik akan meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima layanan sehingga perlu dilakukan survey indeks kepuasan masyarakat dan integritas pelayanan publik. PTSP yang dilaksanakan saat ini bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk memberikan kemudahan pelayanan perizinan kepada masyarakat.

“Iklim penanaman modal yang berdaya saing” adalah penciptaan iklim penanaman modal yang memiliki daya saing lokal untuk menarik minat investasi melalui berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah daerah. Daya saing nasional secara global diukur melalui *-ease of doing business-* versi *World Bank* yang salah satu kriteria adalah kemudahan berusaha dalam memperoleh perizinan. Daya saing lokal akan diarahkan pada bagaimana pemerintah daerah turut andil dalam mendukung pencapaian daya saing nasional dengan melaksanakan kebijakan yang ditentukan. Daya saing lokal berupa penyiapan paket kebijakan investasi Kabupaten Pinrang meliputi kebijakan insentif daerah, kemudahan daerah, PTSP, dan SPIPISE. Dengan paket kebijaka tersebut akan menjadi keunggulan bagi Kabupaten Pinrang dengan daerah lainnya dalam menarik daya tarik penanam modal.



“Pertumbuhan ekonomi daerah” adalah upaya yang telah dilakukan melalui terciptanya kualitas pelayanan dan iklim penanaman modal yang berdaya saing akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya penanam modal di Kabupaten Pinrang akan memberi manfaat pada meningkatkan perekonomian daerah dan serapan tenaga kerja yang akhirnya akan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat Kabupaten Pinrang.

Misi DPMPTSP Kabupaten Pinrang dalam Renstra Tahun 2014 – 2019 sebagai berikut :

1. Memantapkan sistem dan tata kelola Pelayanan Perizinan
2. Menjaga Harmonisasi dan Koordinasi Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal
3. Mengembangkan daya tarik dan minat penanaman modal

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Renja Perubahan - SKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I Menjelaskan secara ringkas gambaran umum perlunya penyusunan Renja Perubahan -SKPD, masalah dan pencapaian tahun rencana, isu dan masalah aktual tahun rencana. Meliputi Latar belakang, landasan hukum, Tujuan dan Sasaran rencana kerja perubahan anggaran serta sistematika penulisan
- BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Badan Pelayanan perizinan Terpadu dan Penanaman Modala (DPMPTSP) semester I (pertama) serta menjelaskan pelaksanaan perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2019.
- BAB III Memuat tujuan, sasaran yang akan dicapai serta program dan kegiatan prioritas perubahan anggaran pada tahun 2019
- BAB IV Penutup merupakan kesimpulan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tahun 2019



## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN PINRANG

#### 2.1. Pelaksanaan Dokumen Anggaran Tahun 2019

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Tabel Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja

##### 2.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran tahun 2019
		Keluaran	Hasil	
1	2	3	4	5
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi.Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Kawat, Faksimile/Internet yang terbayarkan tepat waktu	Terselenggaranya informasi & teknologi yang actual dari dalam dan luar daerah	29.240.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK untuk kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	Tersedianya Kendaraan Dinas 3 unit	2.250.000
3.	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	Persentase anggaran yang terealisasi secara tepat waktu dan sesuai aturan	137.540.000
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	Jumlah bangunan pemerintah yang terjaga kebersihannya secara berkelanjutan	18.199.000
5.	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Jumlah bangunan kantor yang perlengkapan dan peralatan kantornya tersedia secara optimal	13.000.000
6.	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas ke luar daerah yang terlaksana sesuai analisa kebutuhan dan terbayarkan tepat waktu	Jumlah kegiatan yang terkoordinasikan sesuai analisa kebutuhan secara efektif dan efisien	190,000,000
7.	Peningkatan Pelayanan	Jumlah Makan Minum harian pegawai yang	Persentase pelayanan	407.632.000



	Administrasi Perkantoran	tersedia sesuai analisa kebutuhan	administrasi perkantoran yang terlaksana secara efektif dan efisien	
		Jumlah Makan Minum harian Rapat yang tersedia sesuai analisa kebutuhan		
		Jumlah Penggandaan /Fotocopy yang tersedia sesuai analisa kebutuhan		
		Jumlah ATK yang tersedia sesuai analisa kebutuhan		
		Jumlah Cetak bahan adm. perkantoran yang tersedia sesuai analisa kebutuhan		
8.	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset	Jumlah Jasa pengelolaan barang dan aset yang terbayarkan tepat waktu dan jumlah laporan pengelolaan barang dan asset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase barang dan asset daerah yang terinvestasikan sesuai aturan yang berlaku	17.700.000

### 2.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No	Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran tahun 2019
		Keluaran	Hasil	
1	2	3	4	5
1.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Persentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor sesuai analisa kebutuhan	32,500,000
2.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Persentase pemenuhan peralatan gedung kantor sesuai analisa kebutuhan	78.000,000
3.	Pengadaan Meubeleur	Jumlah Meubeleur Kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Persentase pemenuhan meubeleur rumah jabatan / dinas dari kantor sesuai analisa kebutuhan	45.200,000
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara secara Rutin	Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	30.000.000



5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Bahan Bakar Minyak Gas dan Pelumas yang Tersedia dan Terbayarkan tepat waktu	Persentase kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik	32.200.000
		Jumlah Suku Cadang Kendaraan Dinas Yang Di Ganti Sesuai susai analisa kebutuhan		
		Jumlah Jas service yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu		
		Jumlah Jasa Supir yang Tersedia dan Terbayarkan Tepat waktu		
6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Jasa Service Perlengkapan Gedung kantor Yang Tersedia dan Terbayarkan Tepat waktu	Persentase perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	1.200.000
		Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara sesuai analisa kebutuhan		
7.	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	3,000,000
8.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kator yang Di rehabilitasi sedang berat sesuai analisa kebutuhan	Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	70.000,000

### 2.1.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran tahun 2019
		Keluaran	Hasil	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Batik Pegawai dan Pakaian Olahraga	Persentase Aparatur yg disiplin pakaian dinas sesuai aturan yang berlaku	36,000,000



#### 2.1.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran tahun 2019
		Keluaran	Hasil	
1.	Bimbingan implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai analisa kebutuhan	Persentase Aparatur yang meningkat kecapakan dan keterampilan	150,000,000

#### 2.1.5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran tahun 2019
		Keluaran	Hasil	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan kinerja instansi Pemerintah yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Nilai LPPD dan LKJIP	3,360,000
		Jumlah Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu		
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	Tersedianya laporan semesteran sebanyak 12 exemplar	3,080,000
3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Akhir Tahun Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Opini aparatur pengawas internal pemerintah	5,608,000
4	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Program dan kegiatan yang terkoordinir	43,426,000





### 2.1.6 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perizinan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran tahun 2019
		Keluaran	Hasil	
1.	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Jumlah Bimtek PTSP, Service EXCELENT dan In House Training	Persentase fasilitas penyelenggaraan perizinan dan non perizinan	72,400,000
2.	Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan publik	Pengelolaan Kearsipan	Persentase Laporan Layanan Sistem Informasi Kearsipan Perizinan dan Non Perizinan	22,430,000
3.	Sistem Manajemen Pelayanan Publik	Jumlah Laporan one day service, layanan jemput bola, dan SOP/SP	Persentase kegiatan laporan one day service, layanan jemput bola, dan SOP/SP	411,300,000

### 2.1.7 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

No	Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran tahun 2019
		Keluaran	Hasil	
1.	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Jumlah Data Potensi Investasi Daerah	Tercapainya minat investasi atas potensi dan peluang investasi di Kabupaten Pinrang	17.000,000
		Tersedianya Video Profil Potensi Investasi		
2.	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PM	Jumlah Pemantauan LKPM PMDN	Tercapai realisasi PMDN	106.850.000
		Jumlah Pemantauan LKPM PMA	Tercapainya realisasi PMA	
		Jumlah Pengawasan dan Pembinaan Perizinan dan Non Perizinan		
		Jumlah Survey kepuasan masyarakat dan jasa tenaga administrasi pelayanan		
3.	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah Pameran Tingkat Kabupaten Provinsi dan Nasional	Terselenggaranya pameran	136.500,000
4.	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi satgas	Terselenggaranya laporan monitoring dan evaluasi tim satgas	18,310,000



### 2.1.8 Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi

No	Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran tahun 2019
		Keluaran	Hasil	
1	Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi	Jumlah penyelenggaraan Investment Forum (PIF)	Terselenggaranya PIF (Pinrang Investment Forum)	95.000.000
2	Pengembangan Sistem Informasi dan Penanaman Modal	Upgrading Sistem Informasi dan Manajemen Perizinan Terintegrasi	Peningkatan penggunaan aplikasi berbasis IT dalam penyelenggaraan pelayanan publik	126.000.000
		Pengembangan Sistem Informasi Izin Elektronik		
		Maintenance Server dan Aplikasi		
		Pembuatan SOP dan SP Pengaduan		
		Tercetaknya Brosur Pengaduan perizinan dan Roll Banner Kebijakan PM-PTSP		
3.	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah layanan SMS pengaduan	Meningkatnya pemahaman kebijakan PM dan meningkatnya layanan pengaduan serta layanan perizinan ke masyarakat	99.250.000
		Jumlah Sosialisasi penyelenggaraan pengaduan		
		Jumlah SOP dan SP pengaduan		
		Jumlah Kebijakan Penanaman Modal		
4.	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Perizinan dan Non Perizinan	Peningkatan laporan perizinan dan SDM aparat	15,825,000

Dari Uraian Program dan Kegiatan tersebut diatas total anggaran Pokok pada Belanja Langsung yang disediakan adalah Rp. 2.675.000.500 (Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.



## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai Triwulan III (Ketiga) tahun 2019

Pelaksanaan program dan kegiatan sampai triwulan III (ketiga) tahun anggaran 2019 sebagai berikut :

**Tabel 22. Tabel Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai Triwulan III**  
**2.2.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran tahun 2019	Realisasi Triwulan III
		Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi.Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Kawat, Faksimile/Internet yang terbayarkan tepat waktu	Terselenggaranya informasi & teknologi yang actual dari dalam dan luar daerah	32.240.000	16.155.332
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK untuk kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	Tersedianya Kendaraan Dinas 3 unit	2.250.000	2.250.000
4.	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	Persentase anggaran yang terealisasi secara tepat waktu dan sesuai aturan	133.340.000	99.220.000
5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	Jumlah bangunan pemerintah yang terjaga kebersihannya secara berkelanjutan	18.199.000	9.800.000
6.	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Jumlah bangunan kantor yang perlengkapan dan peralatan kantornya tersedia secara optimal	15.150.000	9.980.000
7.	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas ke luar daerah yang terlaksana sesuai analisa kebutuhan dan terbayarkan tepat waktu	Jumlah kegiatan yang terkoordinasikan sesuai analisa kebutuhan secara efektif dan efisien	190,000,000	159.381.300
8.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Makan Minum harian pegawai yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang terlaksana secara efektif dan efisien	362.791.000	159.523.800



		Jumlah Makan Minum harian Rapat yang tersedia sesuai analisa kebutuhan			
		Jumlah Penggandaan /Fotocopy yang tersedia sesuai analisa kebutuhan			
		Jumlah ATK yang tersedia sesuai analisa kebutuhan			
		Jumlah Cetak bahan adm. perkantoran yang tersedia sesuai analisa kebutuhan			
9.	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset	Jumlah Jasa pengelolaan barang dan aset yang terbayarkan tepat waktu dan jumlah laporan pengelolaan barang dan aset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase barang dan aset daerah yang terinvestasikan sesuai aturan yang berlaku	17.700.000	13.350.000

### 2.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No	Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran tahun 2019	Realisasi Triwulan III
		Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	
1.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Persentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor sesuai analisa kebutuhan	92.500,000	32.500.000
2.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang di adakan sesuai analisa kebutuhan	Persentase pemenuhan peralatan gedung kantor sesuai analisa kebutuhan	141.500,000	66.466.820
3.	Pengadaan Meubeleur	Jumlah Meubeleur Kantor yang di adakan sesuai analisa kebutuhan	Persentase pemenuhan meubeleur rumah jabatan / dinas dari kantor sesuai analisa kebutuhan	45.200,000	45.050.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara secara Rutin	Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	30.000.000	29.860.000
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala	Jumlah Bahan Bakar Minyak Gas dan	Persentase kendaraan dinas / operasional	39.700.000	16.700.494



	Kendaraan Dinas/Operasional	Pelumas yang Tersedia dan Terbayarkan tepat waktu	dalam kondisi baik		
		Jumlah Suku Cadang Kendaraan Dinas Yang Di Ganti Sesuai susai analisa kebutuhan			
		Jumlah Jas service yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu			
		Jumlah Jasa Supir yang Tersedia dan Terbayarkan Tepat waktu			
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Jasa Service Perlengkapan Gedung kantor Yang Tersedia dan Terbayarkan Tepat waktu	Persentase perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	2.200.000	600.000
		Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara sesuai analisa kebutuhan			
6.	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	4,800,000	1.485.0000
7.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kator yang Di rehabilitasi sedang berat sesuai anlisa kebutuhan	Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	70.000,000	69.900.000

### 2.1.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran tahun 2019	Realisasi Triwulan III
		Keluaran	Hasil		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Batik Pegawai dan Pakaian Olahraga	Persentase Aparatur yg disiplin pakaian dinas sesuai aturan yang berlaku	36,000,000	18.000.000



### 2.1.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran tahun 2019	Realisasi Triwulan III
		Keluaran	Hasil		
1.	Bimbingan implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai analisa kebutuhan	Persentase Aparatur yang meningkat kecapakan dan keterampilan	208,000,000	160.602.700

### 2.1.5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran tahun 2019	Realisasi Triwulan III
		Keluaran	Hasil		
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan kinerja instansi Pemerintah yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Nilai LPPD dan LKJIP	3,360,000	3.360.000
		Jumlah Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu			
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	Tersedianya laporan semesteran sebanyak 12 exemplar	1,855,000	630.000
3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Akhir Tahun Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Opini aparatur pengawas internal pemerintah	5,608,000	5.608.000
4	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Program dan kegiatan yang terkoordinir	41,926,000	6.671.000



### 2.1.6 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perizinan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran tahun 2019	Realisasi Triwulan III
		Keluaran	Hasil		
1.	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Jumlah Bimtek PTSP, Service EXCELENT dan In House Training	Persentase fasilitas penyelenggaraan perizinan dan non perizinan	86,450,000	11.500.000
2.	Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan publik	Pengelolaan Kearsipan	Persentase Laporan Layanan Sistem Informasi Kearsipan Perizinan dan Non Perizinan	22,430,000	18.675.000
3.	Sistem Manajemen Pelayanan Publik	Jumlah Laporan one day service, layanan jemput bola, dan SOP/SP	Persentase kegiatan laporan one day service, layanan jemput bola, dan SOP/SP	411,250,000	263.905.000

### 2.1.7 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

No	Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran tahun 2019	Realisasi Triwulan III
		Keluaran	Hasil		
1.	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Jumlah Data Potensi Investasi Daerah	Tercapainya minat investasi atas potensi dan peluang investasi di Kabupaten Pinrang	37.000,000	17.000.000
		Tersedianya Video Profil Potensi Investasi			
2.	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PM	Jumlah Pemantauan LKPM PMDN	Tercapai realisasi PMDN	102.150.000	23.240.000
		Jumlah Pemantauan LKPM PMA	Tercapainya realisasi PMA		
		Jumlah Pengawasan dan Pembinaan Perizinan dan Non Perizinan			
		Jumlah Survey kepuasan masyarakat dan jasa tenaga administrasi pelayanan			
3.	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah Pameran Tingkat Kabupaten	Terselenggaranya pameran	77.316,000	12.000.000



		Provinsi dan Nasional			
4.	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi satgas	Terselenggaranya laporan monitoring dan evaluasi tim satgas	18,310,000	3.010.000

### 2.1.8 Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi

No	Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran tahun 2019	Realisasi Triwulan III
		Keluaran	Hasil		
1	Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi	Jumlah penyelenggaraan Invesment Forum (PIF)	Terselenggaranya PIF (Pinrang Investment Forum)	157.000.000	-
	Pengembangan Sistem Informasi dan Penanaman Modal	Upgrading Sistem Informasi dan Manajemen Perizinan Terintegrasi	Peningkatan penggunaan aplikasi berbasis IT dalam penyelenggaraan pelayanan publik	161.000.000	97.203.319
		Pengembangan Sistem Informasi Izin Elektronik			
		Maintenance Server dan Aplikasi			
		Pembuatan SOP dan SP Pengaduan			
		Tercetaknya Brosur Pengaduan perizinan dan Roll Banner Kebijakan PM-PTSP			
2.	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah layanan SMS pengaduan	Meningkatnya pemahaman kebijakan PM dan meningkatnya layanan pengaduan serta layanan perizinan ke masyarakat	91.950.000	15.696.000
		Jumlah Sosialisasi penyelenggaraan pengaduan			
		Jumlah SOP dan SP pengaduan			
		Jumlah Kebijakan Penanaman Modal			
3.	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Perizinan dan Non Perizinan	Peningkatan laporan perizinan dan SDM aparat	15,825,000	9.595.000





### BAB III

## PERUBAHAN RENCANA KERJA DALAM PROGRAM DAN KEGIATAN DISERTAI INDIKATORNYA

### 3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan perubahan rencana kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang yaitu mengukur indikator kinerja mulai dari Capaian Program, masukan (Input), Keluaran (output) sampai kepada hasil (Outcome) dari program dan kegiatan yang direncanakan. Serta menggambarkan keadaan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 3 (tiga) triwulan dalam tahun anggaran 2019 sehingga mensyaratkan adanya konsistensi dengan tugas dan fungsi DPMPTSP, serta merumuskan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya pencapaian visi dan misi DPMPTSP pada tahun 2019. Adapun tujuan DPMPTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan
2. Meningkatkan integritas dan kepuasan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal
4. Meningkatkan kuantitas penanaman modal yang potensial

Bila tujuan menggambarkan keadaan yang ingin dicapai oleh DPMPTSP Kabupaten Pinrang dalam jangka waktu lima tahun ke depan, maka sasaran jangka menengah merupakan ukuran-ukuran spesifik yang menjelaskan sejauh mana tujuan itu telah dicapai. Tujuan menunjukkan *impact* atau kinerja SKPD, sedangkan sasaran menunjukkan indikator kinerja SKPD.

Sebagai indikator kinerja DPMPTSP, sasaran jangka menengah diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya realisasi penerbitan dokumen perizinan
2. Meningkatnya nilai integritas dan indeks kepuasan masyarakat
3. Meningkatnya realisasi penanaman modal.
4. Meningkatnya penanam modal dan serapan tenaga kerja.



Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPSTSP Kabupaten Pinrang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja 2019
1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	Meningkatnya realisasi penerbitan dokumen perizinan	Jumlah Perizinan Usaha Per Tahun	2.557 Izin
			Jumlah Perizinan Non Usaha Per Tahun	863 Izin
			Jumlah Perizinan Penanaman Modal Per Tahun	959 Izin
2	Meningkatkan integritas dan kepuasan masyarakat	Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks : 90,73
3	Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN-Rupiah)	1.020.259.289.317
			Jumlah Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA – US\$)	39.411.395,18
4	Meningkatkan kuantitas penanaman modal yang potensial	Meningkatnya penanam modal dan serapan tenaga kerja	Jumlah Proyek PMDN	957 Proyek
			Jumlah Proyek PMA	2 Proyek
			Jumlah Tenaga Kerja PMDN	2.6816 orang
			Jumlah Tenaga Kerja PMA	50 orang

3.2 Rencana Perubahan Program dan kegiatan tahun 2019

Rencana Kerja Perubahan Program dan Kegiatan tahun 2019 dilaksanakan DPMPSTSP Kabupaten Pinrang sebagai perangkat daerah memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman modal sebagai urusan wajib pemerintah daerah pada sektor penanaman modal. Adapun rencana perubahan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran perubahan ini tidak terjadi penambahan anggaran dan tetap mengacu pada plafond anggaran pokok dan hanya ada beberapa kegiatan yang



digeser sesuai kebutuhan yang perlu dan sangat mendesak (skala prioritas) untuk dilaksanakan.

Adapun uraian Program dan kegiatan rencana kerja perubahan tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Rencana Perubahan Program dan Kegiatan DPMPTSP 2019**  
**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja		Perubahan Anggaran tahun 2019
		Keluaran	Hasil	
1	2	3	4	5
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi.Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Kawat, Faksimile/Internet yang terbayarkan tepat waktu	Terselenggaranya informasi & teknologi yang actual dari dalam dan luar daerah	32.240.000
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK untuk kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	Tersedianya Kendaraan Dinas 3 unit	2.250.000
4.	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	Persentase anggaran yang terealisasi secara tepat waktu dan sesuai aturan	133.340.000
5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	Jumlah bangunan pemerintah yang terjaga kebersihannya secara berkelanjutan	18.199.000
6.	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Jumlah bangunan kantor yang perlengkapan dan peralatan kantornya tersedia secara optimal	15.150.000
7.	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas ke luar daerah yang terlaksana sesuai analisa kebutuhan dan terbayarkan tepat waktu	Jumlah kegiatan yang terkoordinasikan sesuai analisa kebutuhan secara efektif dan efisien	190,000,000
8.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Makan Minum harian pegawai yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang terlaksana secara efektif dan efisien	362.791.000



		Jumlah Makan Minum harianRapat yang tersedia sesuai analisa kebutuhan		
		Jumlah Penggandaan /Fotocopy yang tersedia sesuai analisa kebutuhan		
		Jumlah ATK yang tersedia sesuai analisa kebutuhan		
		Jumlah Cetak bahan adm. perkantoran yang tersedia sesuai analisa kebutuhan		
9.	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset	Jumlah Jasa pengelolaan barang dan aset yang terbayarkan tepat waktu dan jumlah laporan pengelolaan barang dan asset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase barang dan asset daerah yang terinvestasikan sesuai aturan yang berlaku	17.700.000

Program **Pelayanan Administrasi Perkantoran** terdapat perubahan **pada** kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik yaitu belanja listrik kantor dari pokok anggaran sebesar Rp. 29.240.000 menjadi Rp.32.240.000 ini disebabkan karena pekerjaan pemeliharaan website sebesar Rp. 5.000.000 , Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dari Pokok Anggaran Rp.137.540000., menjadi Rp.133.340.000 ini disebabkan karena honorarium pada Panitia Pelaksana Kegiatan ada pengurangan anggaran, Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Rp.13.000.000 menjadi Rp.15.150.000 ini disebabkan karena bertambahnya memori external dan alat kelengkapan computer, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dari Rp.407.632.000 menjadi Rp.362.791.000 mengalami pengurangan seperti ATK, cetak Formulir perizinan dan makan minum harian pegawai. Sehingga total anggaran sebelum perubahan yaitu Rp.815.561.000 dan setelah perubahan Rp.771.670.000.



## 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No	Kegiatan	Indikator Kinerja		Perubahan Anggaran tahun 2019
		Keluaran	Hasil	
1	2	3	4	5
1.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Persentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor sesuai analisa kebutuhan	92,500,000
2.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang di adakan sesuai analisa kebutuhan	Persentase pemenuhan peralatan gedung kantor sesuai analisa kebutuhan	141.500,000
3.	Pengadaan Meubeleur	Jumlah Meubeleur Kantor yang di adakan sesuai analisa kebutuhan	Persentase pemenuhan meubeleur rumah jabatan / dinas dari kantor sesuai analisa kebutuhan	45.200,000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara secara Rutin	Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	30.000.000
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Bahan Bakar Minyak Gas dan Pelumas yang Tersedia dan Terbayarkan tepat waktu	Persentase kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik	39.700.000
		Jumlah Suku Cadang Kendaraan Dinas Yang Di Ganti Sesuai susai analisa kebutuhan		
		Jumlah Jas service yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu		
		Jumlah Jasa Supir yang Tersedia dan Terbayarkan Tepat waktu		
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Jasa Service Perlengkapan Gedung kantor Yang Tersedia dan Terbayarkan Tepat waktu	Persentase perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	2.200.000
		Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara sesuai analisa kebutuhan		



6.	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	4,800,000
7.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kator yang Di rehabilitasi sedang berat sesuai analisa kebutuhan	Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	70.000,000

Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mengalami perubahan anggaran pada Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor yaitu anggaran sebelum perubahan Rp.32.500.000 dan setelah perubahan menjadi Rp.425.900.5yaitu pengadaan Smartboard/Videotron 1 (satu) unit dalam menunjang kelengkapan pelayanan perizinan kantor DPMPTSP. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor yaitu pengadaan computer PC,Scan,dan print untuk aplikasi Gerai Perizinan 1 (satu) paket, pengadaan laptop 2 (dua) unit namun ada pengurangan anggaran dari pengadaan CPU Main Server dan pengadaan memori external (perubahan nomenklatur),selanjutnya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada pokok anggaran Rp.32.200.000 bertambah menjadi Rp.38.700.000 karena pembelian Ban Mobil dan lampu mobil masing-maisng 1 paket diperuntukkan untuk mobil operasional pelayanan perizinan yang harus diganti demi keamanan dan kenyamanan pelayanan ke 12 kecamatan.Selanjutnya Belanja jasa service perlengkapan kantor (perbaikan AC) dari Rp.1.200.000 menjadi Rp. 2.200.000, Belanja jasa service peralatan gedung kantor (Perbaikan Komputer dan printer ) dari Rp. 3.000.000 menjadi Rp.4.800.000. Sehingga total anggaran pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebelum perubahan Rp. 292.100.000 dan setelah perubahan Rp.425.900.500.-



### 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja		Perubahan Anggaran tahun 2019
		Keluaran	Hasil	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Batik Pegawai dan Pakaian Olahraga	Persentase Aparatur yg disiplin pakaian dinas sesuai aturan yang berlaku	36,000,000

### 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja		Perubahan Anggaran tahun 2019
		Keluaran	Hasil	
1.	Bimbingan implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai analisa kebutuhan	Persentase Aparatur yang meningkat kecapakan dan keterampilan	208,000,000

Pada program tersebut diatas pada kegiatan Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan menagalami penamabahan anggaran dari Rp.150.000.000 menjadi Rp.208.000.000

### 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja		Perubahan Anggaran tahun 2019
		Keluaran	Hasil	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan kinerja instansi Pemerintah yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Nilai LPPD dan LKJIP	3,360,000
		Jumlah Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu		
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumah Laporan keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	Tersedianya laporan semesteran sebanyak 12 examplar	1,855,000



3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Akhir Tahun Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Opini aparatur pengawas internal pemerintah	5,608,000
4	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Program dan kegiatan yang terkoordinir	41,926,000

Pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran mengalami pengurangan dari Rp.3.080.000 menjadi Rp.1.855.000 .Pada kegiatan penyusunan perencanaan kerja perangkat daerah mengalami pengurangan anggaran dari Rp. 43.426.000 menjadi Rp. 41.926.000 karena pengurangan belanja cetak dokumen Renstra tahun 2019-2024.

## 6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perizinan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja		Perubahan Anggaran tahun 2019
		Keluaran	Hasil	
1.	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Jumlah Bimtek PTSP, Service EXCELENT dan In House Training	Persentase fasilitas penyelenggaraan perizinan dan non perizinan	86,450,000
2.	Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan publik	Pengelolaan Kearsipan	Persentase Laporan Layanan Sistem Informasi Kearsipan Perizinan dan Non Perizinan	22,430,000
3.	Sistem Manajemen Pelayanan Publik	Jumlah Laporan one day service, layanan jemput bola, dan SOP/SP	Persentase kegiatan laporan one day service, layanan jemput bola, dan SOP/SP	411,250,000

Pada Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perizinan mengalami penambahan pada kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan dari Rp.72.400.000 menjadi Rp.86.450.000 pada pekerjaan alat kelengkapan komputer berupa box pelayanan perizinan dan pelatihan service excellent . Selanjutnya Kegiatan Sistem Manajemen Pelayanan Publik mengalami pengurangan dari Rp.441.300.000 menjadi Rp. 411.250.000 yaitu penggantian hasil SKM dan makan minum lembur dan perjalanan dinas dalam daerah.dialihkan ke pekerjaan yang lebih penting





menjadi skala prioritas. Sehingga Total Anggaran Pokok Rp.536.130.000 menjadi Rp.520.130.000.-

### 7. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

No	Kegiatan	Indikator Kinerja		Perubahan Anggaran tahun 2019
		Keluaran	Hasil	
1.	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Jumlah Data Potensi Investasi Daerah	Tercapainya minat investasi atas potensi dan peluang investasi di Kabupaten Pinrang	37.000,000
		Tersedianya Video Profil Potensi Investasi		
2.	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PM	Jumlah Pemantauan LKPM PMDN	Tercapai realisasi PMDN	102.150.000
		Jumlah Pemantauan LKPM PMA	Tercapainya realisasi PMA	
		Jumlah Pengawasan dan Pembinaan Perizinan dan Non Perizinan		
		Jumlah Survey kepuasan masyarakat dan jasa tenaga administrasi pelayanan		
3.	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah Pameran Tingkat Kabupaten Provinsi dan Nasional	Terselenggaranya pameran	77.316,000
4.	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi satgas	Terselenggaranya laporan monitoring dan evaluasi tim satgas	18,310,000

Pada Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi yang mengalami penambahan anggaran adalah Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah dari Rp.17.000.000 menjadi Rp.37.000.000 pada pekerjaan Pembuatan Video Promosi Potensi Daerah yang merupakan kegiatan yang sangat perlu dilakukan dalam upaya peningkatan promosi daerah di Kabupaten Pinrang untuk menarik para investor.



## 8. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi

No	Kegiatan	Indikator Kinerja		Perubahan Anggaran tahun 2019
		Keluaran	Hasil	
1	Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi	Jumlah penyelenggaraan Invesment Forum (PIF)	Terselenggaranya PIF (Pinrang Investment Forum)	157.000.000
	Pengembangan Sistem Informasi dan Penanaman Modal	Upgrading Sistem Informasi dan Manajemen Perizinan Terintegrasi	Peningkatan penggunaan aplikasi berbasis IT dalam penyelenggaraan pelayanan publik	161.000.000
		Pengembangan Sistem Informasi Izin Elektronik		
		Maintenance Server dan Aplikasi		
		Pembuatan SOP dan SP Pengaduan		
		Tercetaknya Brosur Pengaduan perizinan dan Roll Banner Kebijakan PM-PTSP		
2.	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah layanan SMS pengaduan	Meningkatnya pemahaman kebijakan PM dan meningkatnya layanan pengaduan serta layanan perizinan ke masyarakat	91.950.000
		Jumlah Sosialisasi penyelenggaraan pengaduan		
		Jumlah SOP dan SP pengaduan		
		Jumlah Kebijakan Penanaman Modal		
3.	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Perizinan dan Non Perizinan	Peningkatan laporan perizinan dan SDM aparat	15,825,000

Pada Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi yang mengalami perubahan anggaran adalah pada Kegiatan Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi dari Rp.95.000.000 menjadi Rp.157.000.000 ,kegiatan ini merupakan salah satu Inovasi baru yang dilakukan dengan nama Forum Investasi Pinrang (FIP) yang mana pekerjaan ini merupakan program



unggulan yang dilaksanakan di luar provinsi yaitu di DKI Jakarta dalam upaya pertemuan para investor asing dan dalam negeri dalam rangka menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Pinrang. sehingga Total anggaran pada Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi sebelum perubahan Rp.336.075.000 setelah perubahan sebesar Rp. 425.775.000

Dari uraian tabel tersebut anggaran pokok Dinas Penanaman Modal dan PTSP Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.735.966.807 dan setelah perubahan sebesar Rp.2.821.803.700, sedangkan belanja langsung pada anggaran pokok Rp.2.500.000.000., dan setelah perubahan bertambah menjadi Rp.2.675.000.500

### 8.3. Kelompok Sasaran

Berdasarkan indikator kinerja program dan kegiatan Dinas PMPTSP maka ditentukan kelompok sasaran terhadap program dan kegiatan Tahun 2019 sebagaimana dalam Tabel 3.3 di bawah ini :

**Tabel 3.3**  
**Kelompok Sasaran Program dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2019**

#### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sasaran Program dan Kegiatan
		Keluaran	Hasil	
1	2	3	4	5
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Kawat, Faksimile/Internet yang terbayarkan tepat waktu	Terselenggaranya informasi & teknologi yang actual dari dalam dan luar daerah	Aparatur dan Masyarakat
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK untuk kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	Tersedianya Kendaraan Dinas 3 unit	Aparatur
4.	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	Persentase anggaran yang terealisasi secara tepat waktu dan sesuai aturan	Aparatur
5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	Jumlah bangunan pemerintah yang terjaga kebersihannya secara berkelanjutan	Aparatur dan Masyarakat



6.	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Jumlah bangunan kantor yang perlengkapan dan peralatan kantornya tersedia secara optimal	Aparatur
7.	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas ke luar daerah yang terlaksana sesuai analisa kebutuhan dan terbayarkan tepat waktu	Jumlah kegiatan yang terkoordinasikan sesuai analisa kebutuhan secara efektif dan efisien	Aparatur
8.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Makan Minum harian pegawai yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang terlaksana secara efektif dan efisien	Aparatur
		Jumlah Makan Minum harian Rapat yang tersedia sesuai analisa kebutuhan		
		Jumlah Penggandaan /Fotocopy yang tersedia sesuai analisa kebutuhan		
		Jumlah ATK yang tersedia sesuai analisa kebutuhan		
		Jumlah Cetak bahan adm. perkantoran yang tersedia sesuai analisa kebutuhan		
9.	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset	Jumlah Jasa pengelolaan barang dan aset yang terbayarkan tepat waktu dan jumlah laporan pengelolaan barang dan aset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase barang dan aset daerah yang terinvestasikan sesuai aturan yang berlaku	Aparatur

## 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sasaran Program dan Kegiatan
		Keluaran	Hasil	
1	2	3	4	5
1.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Persentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor sesuai analisa kebutuhan	Aparatur dan Masyarakat
2.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang di adakan sesuai analisa kebutuhan	Persentase pemenuhan peralatan gedung kantor sesuai analisa kebutuhan	Aparatur



3.	Pengadaan Meubeleur	Jumlah Meubeleur Kantor yang di adakan sesuai analisa kebutuhan	Persentase pemenuhan meubeleur rumah jabatan / dinas dari kantor sesuai analisa kebutuhan	Aparatur dan Masyarakat
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara secara Rutin	Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	Aparatur dan Masyarakat
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Bahan Bakar Minyak Gas dan Pelumas yang Tersedia dan Terbayarkan tepat waktu	Persentase kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik	Aparatur dan Masyarakat
		Jumlah Suku Cadang Kendaraan Dinas Yang Di Ganti Sesuai susai analisa kebutuhan		
		Jumlah Jas service yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu		
		Jumlah Jasa Supir yang Tersedia dan Terbayarkan Tepat waktu		
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Jasa Service Perlengkapan Gedung kantor Yang Tersedia dan Terbayarkan Tepat waktu	Persentase perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	Aparatur
		Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara sesuai analisa kebutuhan		
6.	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Aparatur
7.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kator yang Di rehabilitasi sedang berat sesuai anlisa kebutuhan	Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	Aparatur dan Masyarakat

### 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sasaran Program dan Kegiatan
		Keluaran	Hasil	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Batik Pegawai dan Pakaian Olahraga	Persentase Aparatur yg disiplin pakaian dinas sesuai aturan yang berlaku	Aparatur



#### 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sasaran Program dan Kegiatan
		Keluaran	Hasil	
1.	Bimbingan implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai analisa kebutuhan	Persentase Aparatur yang meningkat kecapakan dan keterampilan	Aparatur

#### 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sasaran Program dan Kegiatan
		Keluaran	Hasil	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan kinerja instansi Pemerintah yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Nilai LPPD dan LKJIP	Aparatur
		Jumlah Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu		
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	Tersedianya laporan semesteran sebanyak 12 exemplar	Aparatur
3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Akhir Tahun Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Opini aparatur pengawas internal pemerintah	Aparatur
4	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Program dan kegiatan yang terkoordinir	Aparatur



## 6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perizinan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sasaran Program dan Kegiatan
		Keluaran	Hasil	
1.	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Jumlah Bimtek PTSP, Service EXCELENT dan In House Training	Persentase fasilitas penyelenggaraan perizinan dan non perizinan	Aparatur dan Masyarakat
2.	Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan publik	Pengelolaan Kearsipan	Persentase Laporan Layanan Sistem Informasi Kearsipan Perizinan dan Non Perizinan	Aparatur dan Masyarakat
3.	Sistem Manajemen Pelayanan Publik	Jumlah Laporan one day service, layanan jemput bola, dan SOP/SP	Persentase kegiatan laporan one day service, layanan jemput bola, dan SOP/SP	Aparatur dan Masyarakat

## 7. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

No	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sasaran Program dan Kegiatan
		Keluaran	Hasil	
1.	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Jumlah Data Potensi Investasi Daerah	Tercapainya minat investasi atas potensi dan peluang investasi di Kabupaten Pinrang	Aparatur dan Masyarakat
		Tersedianya Video Profil Potensi Investasi		
2.	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PM	Jumlah Pemantauan LKPM PMDN	Tercapai realisasi PMDN	Aparatur dan Masyarakat
		Jumlah Pemantauan LKPM PMA	Tercapainya realisasi PMA	
		Jumlah Pengawasan dan Pembinaan Perizinan dan Non Perizinan		
		Jumlah Survey kepuasan masyarakat dan jasa tenaga administrasi pelayanan		



3.	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah Pameran Tingkat Kabupaten Provinsi dan Nasioanl	Terselenggaranya pameran	Aparatur dan Investor
4.	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi satgas	Terselenggaranya laporan monitoring dan evaluasi tim satgas	Aparatur dan pelaku usaha

## 8. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi

No	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sasaran Program dan Kegiatan
		Keluaran	Hasil	
1	Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi	Jumlah penyelenggaraan Invesment Forum (PIF)	Terselenggranya PIF (Pinrang Ivestment Forum)	Aparatur dan Investor
	Pengembangan Sistem Informasi dan Penanaman Modal	Upgrading Sistem Informasi dan Manajemen Perizinan Terintegrasi	Peningkatan penggunaan aplikasi berbasis IT dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Aparatur dan pengguna layanan
		Pengembangan Sistem Informasi Izin Elektronik		
		Maintenance Server dan Aplikasi		
		Pembuatan SOP dan SP Pengaduan		
		Tercetaknya Brosur Pengaduan perizinan dan Roll Banner Kebijakan PM-PTSP		
2.	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah layanan SMS pengaduan	Meningkatnya pemahaman kebijakan PM dan meningkatnya layanan pengaduan serta layanan perizinan ke masyarakat	Aparatur dan Masyarakat
		Jumlah Sosialisasi penyelenggaraan pengaduan		
		Jumlah SOP dan SP pengaduan		
		Jumlah Kebijakan Penanaman Modal		
3.	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Perizinan dan Non Perizinan	Peningkatan laporan perizinan dan SDM aparat	Aparatur





### 3.4 Indikator Kinerja

Berdasarkan program dan kegiatan DPMPTSP di atas, maka ditentukan indikator kinerja pencapaian program dan kegiatan DPMPTSP Tahun 2019 sebagaimana dalam Tabel 3.1 di bawah ini :

**Tabel 3.4**  
**Indikator Kinerja Sasaran DPMPTSP Kabupaten Pinrang**

No	Indikator Sasaran	Capaian pada tahun 2018	Indikator Target Kinerja tahun *2019
	Nilai dan Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat	84,25	
5	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks : 84,25	Indeks : 90,73
6	Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN- Rupiah)	Rp. 1.920.500.300.000	Rp 1.020.259.289.317
7	Jumlah Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA – US\$)	US\$ 31.154.680	US\$ 39.411.395,18
8	Jumlah Proyek PMDN	919 Proyek	957 Proyek
9	Jumlah Proyek PMA	2 Proyek	2 Proyek
10	Jumlah Tenaga Kerja PMDN	1.910 Orang	2.681 orang
11	Jumlah Tenaga Kerja PMA	35 orang	50 orang

### 3.5. Sumber Dana Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Program dan Kegiatan

Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang.



Tabel. 3.5 Tabel Sumber Dana yang dibutuhkan

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUMBER DANA
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>			
1	2	3	4
1.	Program Pelayanan adminitrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	APBD Kab
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	APBD Kab
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	APBD Kab
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	APBD Kab
		Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	APBD Kab
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	APBD Kab
		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	APBD Kab
		Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset	APBD Kab
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	APBD Kab
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	APBD Kab
		Pengadaan Meubeleur	APBD Kab
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	APBD Kab
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	APBD Kab
		Pemeliharaan Rutin/Berkala	APBD Kab



		Perlengkapan Gedung Kantor	
		Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	APBD Kab
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	APBD Kab
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	APBD Kab
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	APBD Kab
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	APBD Kab
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	APBD Kab
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	APBD Kab
		Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat daerah	APBD Kab
<b>Pelayanan Penyelenggara Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian (Bidang Perizinan)</b>			
6.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perizinan	Peningkatan Pelayanan Perizinan	APBD Kab
		Penyusunan sistem informasi terhadap layanan public	APBD Kab
		Sistem Manajemen Pelayanan Publik	APBD Kab
<b>Pelayanan Penyelenggara Urusan : Penanaman Modal</b>			
7.	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi</b>	Pengembangan potensi unggulan daerah	APBD Kab
		Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan	APBD Kab



		penanaman modal	
		Penyelenggaraan pameran investasi	APBD Kab
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	APBD Kab
8.	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi investasi</b>	Memfasilitasi dan Koordinasi kerjasama di bidang investasi	APBD Kab
		Pengembangan system informasi dan penanaman modal	APBD Kab
		Kajian kebijakan penanaman modal	APBD Kab
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	APBD Kab



## BAB IV P E N U T U P

### 4.1. Hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan

Renja Perubahan – SKPD dilakukan karena adanya kegiatan yang dianggap sangat perlu dilaksanakan dalam pencapaian target kinerja yang telah direncanakan namun terkendala oleh plafond anggaran yang disediakan sehingga dengan adanya renja perubahan SKPD maka program dan kegiatan yang menjadi skala prioritas dalam pencapaian target kinerja dan program unggulan yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai anggaran yang disediakan oleh APBD Perubahan tahun Anggaran 2019 sehingga tujuan rencana kerja dapat diselesaikan secara optimal.

RENJA Perubahan-SKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2019 ini merupakan arahan dan acuan pelaksanaan tugas bagi bidang-bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang dalam pelaksanaan Rencana Perubahan Anggaran Tahun 2019. Setiap bidang dan seksi agar segera menyusun langkah-langkah kerja dalam pelaksanaannya agar RENJA Perubahan – SKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2019 ini dapat diwujudkan dan direalisasikan secara maksimal dan optimal.

Keberhasilan pelaksanaan RENJA Perubahan-SKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2019 akan sangat tergantung pada kesungguhan jajaran staf Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta peran aktif masyarakat dalam mengimplementasikan rencana-rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2014-2019.

Dengan demikian pada akhirnya hasil pelaksanaan kegiatannya mampu memberikan hasil yang maksimal dan optimal yang dapat dirasakan oleh semua pihak.

Pinrang, Agustus 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

**ANDI MIRANI, AP.,M.Si**

Pangkat : Pembina TK.I

Nip. 19740603 199311 2 001

